

Manajemen Cadangan Pangan Sebagai Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Ogan Komering Ulu

Witri Miriza, Munajat, Yetty Oktarina

Program Pascasarjana, Magister Ekonomi Pertanian Universitas Baturaja

Email :witri.miriza23@gmail.com,munajat.ub@gmail.com,y3tty07@yahoo.com

Abstrak: Berdasarkan data BPS tahun 2021, dari 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumsel, Kabupaten OKU menduduki peringkat ke 12 penghasil padi. Yang artinya Kabupaten OKU bukan merupakan daerah lumbung pangan. kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen cadangan pangan sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten OKU. Jika dibandingkan antara jumlah produksi beras dan jumlah kebutuhan ideal beras di Kabupaten OKU maka produksi beras Kabupaten OKU belum mencukupi untuk kebutuhan seluruh penduduk Kabupaten OKU. Namun kebutuhan beras di Kabupaten OKU selalu tercukupi dari Kabupaten lain. Karena meskipun stok beras hasil produksi sendiri belum mencukupi tetapi akses untuk mendapatkan beras dari kabupaten lain cukup baik. Akan tetapi cadangan pangan pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk penanggulangan keadaan darurat, bencana alam, rawan pangan dan mengatasi gejolak harga.

Kata kunci: Manajemen, Cadangan Pangan, Ketahanan Pangan.

Abstract: Based on BPS data for 2021, from 13 existing districts in Province South Sumatra, OKU Regency occupies ranking to 12 producers rice. Which means OKU district is not is area barn food. study This aim for analyze how management backup food as effort increase resilience food in OKU District. If compared to between amount production rice and amount ideal requirement of rice in OKU district then production rice OKU District yet sufficient For need whole resident OKU District. However need rice in OKU district always sufficient from another district. Because although stock rice results production alone Not yet sufficient but access For get rice from regency other Enough ok. Will but backup food government really needed for countermeasures circumstances emergency, disaster natural, vulnerable food and overcome turmoil price.

Keyword: Management, Backup Food, Resilience Food

1. PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, serta persaingan hidup semakin tinggi, arus perdagangan barang dan/atau jasa semakin meluas bahkan melintasi batas-batas wilayah suatu negara dan kebutuhan masyarakat akan informasi juga semakin tinggi. Kebutuhan mendasar yang sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya adalah pangan. Pengertian tentang pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan baik yang diolah maupun tidak

diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman [3]

Pangan menjadi kebutuhan dasar dan sumber gizi yang penting dalam keberlangsungan hidup manusia berperan meningkatkan kecerdasan manusia, kesehatan, serta pertumbuhan mental. Pemenuhan pangan yang cukup merupakan bentuk investasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menjadi syarat bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya yaitu pendidikan dan pekerjaan

[4] Tiga aspek yang terkandung dalam ketahanan pangan yang sejalan dengan tiga komponen utama ketahanan pangan berdasarkan World Health Organization (WHO) yang meliputi ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional [5].

Terjaminnya hak atas pangan di Indonesia dapat mencegah dan mengurangi target jumlah penduduk miskin dan kurang gizi pada anak-anak. Target tersebut sesuai dengan komitmen pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) yang tercakup dalam Goal 2, yaitu “End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture” yang akan dicapai pada tahun 2030. Artinya, pemenuhan pangan dalam upaya pemberantasan rawan pangan atau kelaparan merupakan salah satu topik utama yang dibahas secara global melalui konferensi PBB [7]

Namun, Menurut International Monetary Fund (IMF) dalam artikel yang dirilis di website resminya, kerawanan pangan telah meningkat sejak 2018. Bahkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina, faktor-faktor seperti meningkatnya frekuensi dan keparahan guncangan iklim, konflik regional, dan diperburuk dengan kondisi pandemi global, telah memberikan dampak pada terganggunya produksi dan distribusi pangan, serta meningkatkan kebutuhan biaya hidup. Lebih beratnya lagi, dengan situasi perang di Ukraina, semakin mendorong harga makanan dan pupuk lebih tinggi lagi, merugikan importir, bahkan mendorong beberapa negara untuk memberlakukan pembatasan ekspor [2].

Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan

politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu [3] Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki hasil melimpah akan potensi alamnya baik pertanian maupun peternakannya (Lestari et al., 2021).[12]

Indonesia pada waktu kepemimpinan presiden Soeharto telah meraih predikat swasembada pangan pada tahun 1984-1986 dimana kebutuhan akan pangan serta konsumsi pada waktu itu hanya 25 juta ton dan terjadi surplus atau penurunan sebesar 2 juta ton. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi Indonesia sekarang yang berstatus sebagai negara pengimpor beras ke negara lain. Menginjak tahun 2000 Indonesia mulai melakukan aktivitas impor beras lagi di negara lain dan tercatat tidak pernah absen mengimpor beras. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan dari stok beras Indonesia agar ketahanan pangan masyarakatnya tetap terjaga (Hasanah, 2022) [13]

Stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan aspek penting untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu upaya untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah dengan memperkuat stok pangan yang mencakup jumlah, kualitas, mekanisme pengadaan dan penyalurannya [8].

Ketahanan pangan yang baik juga dapat dicapai dengan mengembangkan cadangan pangan suatu daerah agar mampu bertahan. Indonesia memiliki potensi cadangan pangan pada titik rendah sehingga hal tersebut menjadi permasalahan serius apabila tidak tertangani. Hal tersebut juga terjadi pada dunia yang mengalami penurunan cadangan pangan cukup besar.

Banyak faktor yang menyebabkan turunnya nilai cadangan pangan suatu daerah seperti iklim yang tidak dapat diprediksikan dengan baik. Iklim yang buruk menyebabkan adanya kekeringan maupun banjir dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga banyak daerah yang mengalami gagal panen. Faktor kedua yang mempengaruhi cadangan pangan adalah musim panen yang tidak sama sehingga setiap daerah

harus mampu mencukupi konsumsi masyarakatnya dari produksi daerah tersebut. Faktor ketiga yang menyebabkan cadangan pangan menurun adalah adanya kejadian genting dan darurat seperti bencana alam. Daerah yang memiliki cadangan pangan yang baik cenderung mampu mengatasi permasalahan rawan pangan dan kurangnya pangan namun sifatnya hanya jangka pendek atau bersifat sementara [1]

Indonesia memiliki 34 provinsi dari provinsi tersebut ada lima provinsi yang menghasilkan produksi padi tertinggi yaitu salah satunya adalah provinsi Sumatera Selatan yang menjadi peringkat ke lima penghasil produksi padi terbesar di Indonesia [6].

Berdasarkan data BPS produksi padi dan beras menurut propinsi tahun 2021, Provinsi Sumatera Selatan menjadi Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera pertama penghasil beras terbesar di Indonesia yang menghasilkan Padi sebesar 2.603.396 ton GKG atau setara 1.493.568 ton beras dengan luas lahan 539.316 ha.

Sementara Kabupaten OKU berdasarkan data BPS tahun 2021, dari 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumsel, Kabupaten OKU menduduki peringkat ke 12 penghasil padi. Yang artinya Kabupaten OKU bukan merupakan daerah lumbung pangan.

Berpijak dari uraian diatas, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen cadangan pangan sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan di kabupaten OKU

1.1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketersediaan Pangan di Kabupaten OKU?
2. Bagaimana Kebutuhan Pangan di Kabupaten OKU?
3. Bagaimana Manajemen Cadangan Pangan di Kabupaten OKU

1.2. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menggambarkan ketersediaan pangan Kabupaten OKU
2. Menganalisis kebutuhan pangan Kabupaten OKU
3. Menganalisa manajemen cadangan pangan di Kabupaten OKU

1.3. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam rangka mencapai ketahanan pangan.
2. Sebagai bahan informasi bagi dinas terkait dalam rangka mendukung program ketahanan pangan.
3. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. LANDASAN TEORI

Definisi ketahanan pangan pertama kali dicetuskan dalam International Congress of Nutrition (ICN) yang diselenggarakan di Roma tahun 1992.

Deklarasi Roma (1992) menyebutkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari.

Definisi tersebut dipertegas lagi pada Deklarasi Roma II tentang Ketahanan Pangan Dunia dan Rencana Tindak Lanjut Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Pangan Dunia tahun 1996 menjadi ketahanan pangan terwujud apabila semua orang, setiap saat, memiliki akses secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan selera bagi kehidupan yang aktif dan sehat [9].

Masalah ketahanan pangan tidaklah sederhana, melainkan merupakan masalah yang kompleksitas yang terdiri dari empat aspek antara lain:

- 1) aspek penyediaan jumlah pangan yang cukup untuk memenuhi permintaan pangan yang meningkat karena pertumbuhan penduduk, perubahan komposisi penduduk maupun akibat peningkatan penduduk,
- 2) aspek pemenuhan tuntutan kualitas dan keanekaragaman bahan pangan untuk mengantisipasi perubahan preferensi konsumen yang semakin peduli pada masalah kesehatan dan kebugaran,
- 3) aspek tentang pendistribusian bahan-bahan pangan pada ruang dan waktu dan
- 4) aspek keterjangkauan pangan (food accessibility) yaitu ketersediaan bahan pangan (jumlah, kualitas, ruang dan waktu) harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat [15].

Indonesia sebagai salah satu negara yang menyatakan komitmen untuk melaksanakan deklarasi Roma menerima konsep ketahanan pangan tersebut yang dilegitimasi pada rumusan peraturan pemerintah No 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan, dimana ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Definisi tersebut kemudian dipertegas dalam Peraturan Menteri Pertanian No 65/OT.140/12/2010 Tentang Standar Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupate/Kota, dimana disebutkan bahwa ketahanan pangan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau [9].

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah [11].

Pentingnya beras dalam hal kebutuhan pangan yaitu beras sebagai komoditas basis strategis. Pemerintah selalu berupaya meningkatkan ketahanan pangannya dari produksi dalam negeri. Sasaran indikatif produksi komoditas utama tanaman pangan dan cadangan pangan pemerintah berbasis pada beras.

Namun demikian, dengan semakin berkurangnya areal garapan per-petani, keterbatasan pasokan air irigasi dan mahalnya harga input serta relatif rendahnya harga produk dapat menjadi faktor-faktor penghambat atau kendala untuk program peningkatan kesejahteraan dan kemandirian petani yang berbasis sumberdaya lokal tersebut.

Selain itu penduduk yang semakin membesar, dengan sebaran populasi yang menyebar dan cakupan geografis yang luas. Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah yang mencukupi, terdistribusi secara merata sepanjang waktu dengan harga terjangkau serta memenuhi kriteria kecukupan konsumsi maupun persyaratan operasional logistik, oleh karena itu program pengelolaan distribusi dan pasar pangan khususnya beras sangatlah diperlukan [14].

Stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan aspek penting untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu upaya untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah dengan memperkuat stok pangan yang mencakup jumlah, kualitas, mekanisme pengadaan dan penyalurannya [8].

Dalam konteks kemandirian pangan, Pemerintah melaksanakan program swasembada untuk lima bahan pangan pokok, yaitu untuk beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Mengingat bahwa produksi beberapa komoditas pangan, seperti beras, jagung dan kedelai bersifat musiman, maka untuk menjamin ketersediaan pangan menurut waktu dan tempat, diperlukan pengelolaan cadangan pangan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pangan diluar musim panen, dan atau sumber pangan bagi daerah-daerah yang bukan merupakan sentra produksi pangan [10].

3. METODE PENELITIAN

Tabel 1. Produksi Sereal-pokok dan Umbi-umbian 2017-2021 (Ton)

Sereal-pokok	2018	2019	2020	2021
Padi	66.803,0	71.186,0	48.839,0	36.852,0
Jagung	67.756,5	54.972,5	56.688,5	39.731,00
Ubi Kayu	1.224,5	1.069,5	620,0	527,00
Ubi Jalar	9,30	9,3	18,6	0
Total	135.802,30	127.237,3	106.166,1	77.110,0

Sumber: Dinas Pertanian Kab OKU, 2022

Berdasarkan Tabel 1 produksi umbi-umbian di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami penurunan sejak tahun 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya luas tanam dan menurunnya produktivitas. Produksi padi selama 5 tahun terakhir mengalami naik turun. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan produksi, Pada Tahun 2019 pencapaian produksi padi meningkat menjadi 71.186 ton dari produksi padi tahun 2017 sebanyak 59.406 Ton, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 48.839, bahkan pada tahun 2021 menurun menjadi 36.852

Dalam menyusun jurnal penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik data sekunder melalui beberapa kajian literatur.

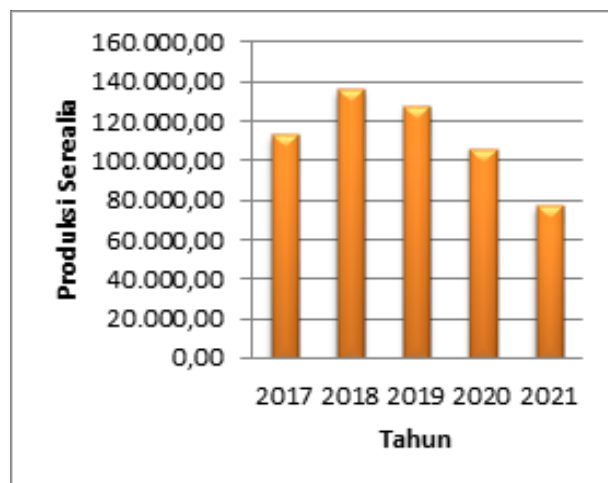
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketersediaan Pangan

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 16,32 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2021 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menyumbang hampir 99 % dari total produksi sereal-pokok kabupaten.

Ton. Begitu juga dengan produksi jagung. Selama 5 tahun terakhir produksi jagung pun mengalami naik turun. Produksi jagung tertinggi selama 5 tahun terakhir adalah pada tahun 2018 yang mencapai 67.765 Ton, namun pada tahun 2021 produksi jagung hanya 39.371 Ton. Total produksi sereal-pokok dan laju pertumbuhan produksi tahun 2017-2021 menunjukkan penurunan sebesar 32,12%, yaitu dari total produksi tahun 2017 sebesar 113.069,2 ton menjadi 76.750 ton pada tahun 2021. Sebaran total produksi sereal-pokok selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 135.802,3 ton dan terkecil pada tahun 2021

yaitu sebesar 76.750 ton. Adapun produksi serealiala kabupaten oku dapat kita gambarkan pada grafik berikut ini:



Gambar 2. Produksi Total Serealiala Kabupaten OKU Tahun 2017-2021

Dari grafik terlihat bahwa produksi serealiala Kabupaten OKU selama lima tahun terakhir hanya mengalami peningkatan pada tahun 2018, sedangkan tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan. Semakin menurunnya produksi serealiala disebabkan oleh laju konversi lahan pertanian di Kabupaten OKU cukup signifikan terutama lahan pertanian padi. Untuk dapat melihat lebih rinci produksi padi di Kabupaten OKU dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Produksi Padi perKecamatan Tahun 2017 - 2021 (Ton)

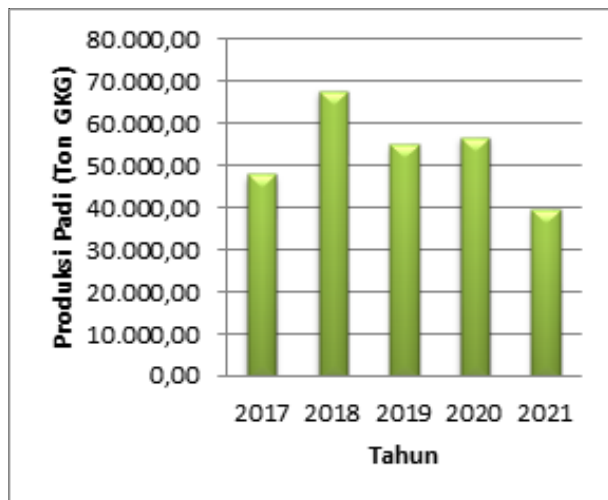
Kecamatan	Produksi Padi				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lengkiti	2.038	3.332	3.893	2.616	4.240
Sosoh Buay Rayap	1.543	2.256	2.610	2.351	2.586
Pengandonan	17.074	13.168	15.066	9.374	5.904
Muara Jaya	9.569	7.584	8.136	5.626	3.115
Semidang Aji	8.798	12.825	14.046	7.683	5.745
Ulu Ogan	10.241	15.779	15.979	10.468	6.168
Peninjauan	344	122	240	81	746
Sinar Peninjauan	3.195	2.660	4.096	3.545	3.571
Lubuk Batang	2.314	1.634	1.422	1.531	1.717
Lubuk Raja	732	2.259	1.284	1.317	510
Baturaja Barat	870	707	584	191	964
Baturaja Timur	937	2.467	1.727	1.475	108
Kedaton Peninjauan Raya	1.751	2.010	2.104	2.582	1.478
Total	59.406	66.803	71.187	48.840	36.852

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten OKU

Selama lima tahun terakhir produksi padi mengalami peningkatan terbanyak pada tahun 2019 di 8 kecamatan. Adapun produksi padi tertinggi terjadi di kecamatan Pengandonan sebesar 17.074 ton pada tahun 2017. Kecamatan Pengandonan, Ulu Ogan dan Semidang Aji adalah 3 kecamatan penyumbang

produksi padi terbanyak untuk Kabupaten OKU. Sementara peninjauan adalah kecamatan yang paling sedikit menghasilkan produksi padi.

Adapun produksi padi Kabupaten OKU dapat digambarkan pada grafik berikut ini:



Gambar 3. Produksi Padi perKecamatan Tahun 2017 - 2021 (Ton GKG)

Produksi padi Kabupaten OKU mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. pada tahun 2019 mencapai 71.187 Ton GKG. Namun tahun 2020 – 2021 produksi padi terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena konversi lahan pertanian padi menjadi lahan pertanian lain seperti jagung, ataupun karet. Ada juga sebagian lahan sawah yang dikonversi menjadi lahan permukiman seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

B. Kebutuhan Pangan

Berdasarkan widya karya nasional pangan dan gizi tahun 2018 standar pola pangan harapan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Standar Pola Pangan Harapan

No	Kelompok Pangan	Berat (Gr/Kap/Hr)	Energi (Kkal/Kap/Hr)	% AKG
1.	Padi-padian (Beras)	296	1.050	50,0
2.	Umbi-umbian	108	126	6,0
3.	Pangan Hewani	161	252	12,0
4.	Minyak dan Lemak	22	210	10,0
5.	Buah/Biji Berminyak	11	63	3,0
6.	Kacang-kacangan	38	105	5,0
7.	Gula	32	105	5,0
8.	Sayur dan Buah	269	126	6,0
9.	Lain-lain	-	63	3,0
	Total		2100	100

Sumber: Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi 2018

Jika berdasarkan standar pph maka konsumsi ideal seluruh penduduk Kabupaten OKU pada tahun 2021 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk} \times 296 \times 365}{1.000.000} \\ &= \frac{371.110 \times 296 \times 365}{1.000.000} \\ &= 40.095 \text{ Ton} \end{aligned}$$

Jika dibandingkan antara jumlah produksi beras dan jumlah kebutuhan ideal beras dikabupaten oku maka produksi beras Kabupaten OKU belum mencukupi untuk kebutuhan seluruh penduduk

Kabupaten OKU. Namun kebutuhan beras di Kabupaten OKU selalu tercukupi dari Kabupaten lain. Karena meskipun stok beras hasil produksi sendiri belum mencukupi tetapi akses untuk mendapatkan beras dari kabupaten lain cukup baik.

C. Manajemen Cadangan Pangan

Cadangan Pangan adalah persediaan bahan Pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak

harga. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan nasional, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah cadangan pangan pemerintah daerah. Cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah.

- **Perencanaan**

Perencanaan pengadaan cadangan pangan harus mempertimbangkan beberapa unsur yaitu

- a. Jumlah Produksi Pangan Kabupaten OKU
- b. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan bencana alam, pasca bencana alam, keadaan darurat dan kerawanan pangan.

Perhitungan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah harus disesuaikan dengan:

- a. Jumlah Penduduk
- b. Konsumsi beras perkapita pertahun
- c. Proporsi terhadap cadangan beras daerah

- **Organisasi Pelaksana**

Pelaksanaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Kabupaten OKU dilaksanakan oleh Dinas ketahanan pangan bekerjasama dengan Bulog.

- **Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran**

Pengadaan cadangan pangan di Kabupaten OKU mengutamakan pembelian beras melalui bulog, pembelian cadangan pangan dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah dan dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya. Guna menjaga kualitas dan daya tahan dalam penyimpanan, maka beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang Bulog dan di kelola oleh perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan.

Penyaluran cadangan pangan dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 gram/hari/jiwa dengan ketentuan paling lama 60 hari atau sesuai hasil investigasi tim pelaksana. Adapun tim pelaksana

terdiri dari dinas-dinas lintas sektor diantaranya adalah DKP, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, BPBD, Bappelitbangda, Bagian Ekonomi Setda dan Bulog.

- **Pengawasan**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkala dan insidentil. Sementara Dinas Ketahanan Pangan wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Ketersediaan pangan di Kabupaten OKU cukup baik, walaupun produksi padi di Kabupaten OKU belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penduduk, tetapi dengan akses pangan yang baik maka kebutuhan pangan bisa didapat dari kabupaten lain. Namun, cadangan pangan pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk penanggulangan keadaan darurat, bencana alam, rawan pangan dan mengatasi gejolak harga.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan ketersediaan pangan perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sawah guna meningkatkan produksi. Manajemen cadangan pangan perlu lebih ditingkatkan, bukan hanya mengelola cadangan pangan pemerintah tetapi juga cadangan pangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. A. S. Herdiana, "*Potensi Cadangan Pangan Masyarakat di Kabupaten Ngawi*," *Din. Sos. Ekon.*, Vol. 22, No. 4, pp. 141–150, 2021, doi: 10.31857/s013116462104007x.

- [2] BPKP, “Warta Pengawasan Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan,” 2022.
- [3] F. Fauzin, “Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia yang Berbasis pada Kedaulatan Pangan,” *J. Pamator J. Ilm. Univ. Trunojoyo*, Vol. 14, No. 1, pp. 1–9, May 2021, doi: 10.21107/pamator.v14i1.10497.
- [4] D. Atasa, D. W. Laily, and P. D. Wijayanti, “Dinamika Ketersediaan Pangan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Kota Malang,” *J. Agrinika J. Agroteknologi dan Agribisnis*, Vol. 6, No. 1, pp. 10–22, Mar. 2022, doi: 10.30737/AGRINIKA.V6I1.2171.
- [5] D. Mustafa, A. A. Arief, Amiluddin Amiluddin, and F. Firman, “Ketahanan Pangan Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Pemancing di Pulau-pulau Kecil (Studi Kasus Pulau Barrang Caddi Kota Makassar),” *J. IPTEKS Pemanfaat. Sumberd. Perikan.*, Vol. 7, No. 14, p. 2020, Nov. 2020, doi: 10.20956/JIPSP.V7I14.11656.
- [6] E. Pusvita, S. Sriati, and D. Adriani, “Analisis Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Beras di Kabupaten Ogan Komering Ulu,” *SEPA J. Sos. Ekon. Pertan. dan Agribisnis*, Vol. 15, No. 2, p. 97, 2019, doi: 10.20961/sepa.v15i2.27862.
- [7] M. Wibowo, “Policy Strategy to Increase The Regional Food Security in Village of Soak Batok Ogan Ilir Regency (Supervised by Elisa Wildayana),” 2022.
- [8] N. Rusono, “Strengthening Policy on Government Rice Stock Management,” No. I, 2019.
- [9] G. Prayitno, M. Dito, and A. Hidayat, “Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat,” *Artic. Agribus. J.*, 2020, doi: 10.15408/aj.v14i1.16320.
- [10] Hermanto, “Pengembangan Cadangan Pangan Nasional Dalam Rangka Kemandirian Pangan (Developing National Food Reserve to Support Food Self-Reliance),” *Forum Penelit. Agro Ekon.*, Vol. 31, No. 1, pp. 1–13, 2013
- [11] K. P. Badan Ketahanan Pangan, “Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Food Security and Vulnerability Atlas,” 2021.